STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN DESA WISATA DI SELINGKAR WILIS KABUPATEN TRENGGALEK

Oleh:
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Community based tourism dalam bentuk desa wisata merupakan pendekatan baru dalam pengembangan pariwisata di kawasan pedesaan. Desa wisata menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan destinasi wisata dan melakukan pendistribusian keuntungan ekonomi secara merata. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *mix method* (kuantitatif dan kualitatif). Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa, Terdapat 15 faktor pengembangan desa wisata dimana 5 faktor prioritasnya diantaranya: 1) Daya tarik wisata; 2) Keunikan; 3) Pelibatan dan penerimaan masyarakat; 4) Tokoh penggerak; dan 5) Kebijakan pendukung. Berdasarkan analisis skoring terhadap kelima belas faktor tersebut, Kabupaten Trenggalek berada pada kategori cukup layak (nilai 2,75 dari 5). Selanjutnya, berdasarkan analisis kelayakan fisik, ekonomi dan budaya, hanya 9% dari total desa di Kabupaten Trenggalek yang sampai dengan saat ini layak dikembangkan menjadi desa wisata. Adapun rekomendasi untuk pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek ke depan dikategorikan menjadi 4 strategi utama yaitu: *Optimization, Strengthening, Tourism Reform dan Survive and Develop.*

Kata kunci: *community based tourism*, desa wisata, kelayakan.

1. Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu dari jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Dengan kata lain, juga meningkatkan daya saing wilayah dan Pendapatan Asli Daerah (Nurisyah et al, 2003 dalam Hasegawa dan Umilia, 2017). Pariwisata juga dapat menarik investor dari daerah luar (Rosyidie, 2000 dalam Hasegawa dan Umilia, 2017). Selain itu pajak dan retribusi dari tempat wisata merupakan sumber pendapatan bagi daerah tempat wisata tersebut.

Sejalan dengan dinamika, gerak perkembangan pariwisata merambah dalam berbagai terminologi seperti, *sustainable tourism development, rural tourism, ecotourism*, yang merupakan pendekatan pengembangan kepariwisataan yang berupaya untuk menjamin agar wisata dapat dilaksanakan di daerah tujuan wisata bukan perkotaan. Saat ini trend pariwisata mengalami perubahan dari yang sebelumnya yaitu pariwisata konvensional berubah menjadi pariwisata minat khusus (Priyanto dan Safitri, 2016). Salah satu pendekatan pengembangan wisata alternatif adalah desa wisata untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam bidang pariwisata (Yoeti, 1996 dan Suwena, 2010).

Dalam pengembangannya, pariwisata memiliki beberapa bentuk, salah satunya pariwisata berbasis masyarakat. Pariwisata Berbasis Masyarakat, atau yang sering disebut sebagai *Community Based Tourism* (CBT) merupakan bentuk pariwisata yang dikelola oleh masyarakat lokal dengan menitikberatkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial, dan budaya untuk membantu wisatawan agar dapat memahami dan mempelajari tata cara hidup masyarakat lokal. CBT bertujuan untuk membangun serta memperkuat kemampuan organisasi pada masyarakat lokal. Hal inilah yang membedakannya dengan pariwisata konvensional yang memaksimalkan profit untuk investor (*mass tourism*). CBT lebih mengutamakan peningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat lokal (Suansri, 2003 dan Muallisin, 2007).

Pendirian desa wisata merupakan salah satu bentuk penerapan CBT. Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi

daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduknya masih memiliki tradisi dan budaya yang relatif masih asli. Selain itu, beberapa faktor pendukung seperti makanan khas, sistem pertanian dan sistem sosial turut mewarnai sebuah kawasan desa wisata. Di luar faktor-faktor tersebut, alam dan lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan salah satu faktor terpenting dari sebuah kawasan tujuan wisata (Yoeti, 1996).

Melalui pengembangan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan, dimana hal tersebut sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Di samping itu, keberadaan desa wisata mampu menjaga kelestarian budaya masyarakat pedesaan melalui keterlibatan masyarakatnya sebagai pelaku kegiatan pariwisata di desanya (Susyanti, 2013).

Kawasan Selingkar Wilis merupakan kawasan lereng gunung Wilis yang membentang dari Kabupaten Kediri, Tulungagung, Nganjuk, Madiun, Ponorogo dan Trenggalek. Lereng gunung Wilis di Kabupaten Trenggalek terletak di Kecamatan Bendungan dengan ketinggian rata-rata sebesar 704 mdpl. Upaya untuk menggeliatkan potensi ekonomi di kawasan Selingkar Wilis pada tahun 2019 menarik perhatian pemerintah pusat dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan. Dalam Peraturan Presiden tersebut, fokus pengembangan ekonomi adalah pengembangan desa wisata dengan branding pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa Desa Wisata Cemara (Cerdas, Mandiri, Sejahtera). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur khususnya yang tinggal di kawasan pedesaan. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan Kabupaten Trenggalek sebesar 10,98% (BPS Kab. Trenggalek, 2020).

Menurut, Khofifah Indar Pawaransa, Gubernur Jawa Timur, program Dewi Cemara merupakan jawaban atas masih adanya kesenjangan antara kota dan desa. Kemiskinan di pedesaan sebesar 14,46% sedangkan di perkotaan sebesar 6,9%. Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dewi Cemara sudah diterapkan di beberapa daerah. Sebagai contoh baru-baru ini diresmikan di Kediri, yakni desa wisata budidaya cacing. Desa wisata ini merespons tingginya kebutuhan akan cacing untuk berbagai keperluan.(www.inews.id, 2020).

Kabupaten Trenggalek dengan branding "Venturous Trenggalek" sudah jelas memiliki keinginan yang kuat untuk mengembangkan sektor wisata bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor wisata di Kabupaten Trenggalek masih mengandalkan eksotisme pantai yang ada di selatan seperti Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Pantai Pelang, dan Pantai Blado. Dalam perspektif CBT, geliat masyarakat dalam mengembangkan pariwisata mulai menampakkan eksistensinya melalui penciptaan berbagai desa wisata seperti Desa Wisata Sawahan (River Tubing), Desa Wisata Senden (Goa Ngerit), Desa Wisata Depok (Putri Maron) dan Desa Wisata Dompyong (Coban Rambat).

Dalam implementasinya masih ditemui berbagai permasalahan yang ada di desa tersebut diantaranya: 1) Masih sedikitnya jumlah pengunjung/wisatawan; 2) Masih lemahnya daya tarik (spesialisasi) wisata; 3) Aksesibilitas yang masih rendah (jalan sempit, tidak adanya moda angkutan umum); 4) Belum memiliki pusat informasi yang mumpuni; 5) Masih minimnya promosi wisata; 6) Amenitas wisata (akomodasi, rumah makan, parkir) masih sangat terbatas; dan 7) Belum optimalnya kinerja kelembagaan wisata. Daya tarik dari desa wisata adalah aktivitas budaya masyarakat beserta adat istiadatnya. Dari semua desa wisata yang berkembang di Kabupaten Trenggalek, aspek budaya/adat istiadat masyarakatnya belum tereksplorasi dengan kuat.

Mengacu pada kondisi eksisting Kabupaten Trenggalek, maka diperlukan studi kelayakan pengembangan desa wisata di kawasan Selingkar Wilis sehingga didapat rekomendasi pengembangannya di masa yang akan datang.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pariwisata

Pariwisata merupakan perjalanan yang dilakukan seorang atau sekelompok orang dari daerah asalnya menuju ke tempat lain diluar lingkungan tempat tinggalnya untuk sementara

waktu dengan tujuan bukan untuk melakukan pekerjaan. Kurt Morgenroth dalam Widyawati dan Ma'rif, (2014); Kusmayadi (2000: 5); Marpaung (2002: 5); Goeldner & Ritchie (2009); Inskeep & Edward (1991).

2.2 Desa Wisata

Desa wisata adalah sutu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan Nuryanti (1993); Yoeti (1996).

2.3 Sistem Desa Wisata

Komponen desa wisata berdasarkan hasil kajian teori antara lain:

Tabel Kajian Teori Komponen Desa Wisata

No	Sumber Teori	Komponen Desa Wisata
1	Gumelar (2010)	1. Keunikan, keaslian, sifat khas 2. Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa 3. Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang menarik minat pengunjung 4. Memiliki peluang untuk berkembang
2	Putra (2006)	1. Memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat. 2. Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang telah dijual. 3. Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya 4. Aksesibilitas dan infrastruktur mendukung program desa wisata 5. Terjaminnya keamaann, ketertiban, dan kebersihan.
3	Prasiasa (2011)	1. Partisipasi masyarakat lokal 2. Sistem norma setempat 3. Sistem adat setempat 4. Budaya setempat
4	Hadiwijoyo (2012)	1. Aksesibilitas 2. Memiliki obyek-obyek menarik: alam, seni budaya, legenda, makanan lokal. 3. Masyarakat dan aparat desanya menerima dan memberikan dukungan 4. Keamanan di desa terjamin 5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi dan tenaga kerja yang memadai 6. Beriklim sejuk dan dingin 7. Berhubungan dengan obyek wisata lain
5	Pitana (2002)	1. Skala usaha yang dikembangkan skala kecil 2. Pelaku adalah *local owned and managed*. 3. Input yang digunakan baik sewaktu konstruksi maupun operasional berasal dari daerah setempat 4. Aktivitas berantai (*spin of activity*) yang ditimbulkan 5. Berbasis kebudayaan lokal 6. Ramah lingkungan 7. Tidak beragam 8. Menyebar di berbagai daerah.

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2020

3. Metode Penelitian

3.1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *mix method* (campuran) yaitu kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif adalah *understanding of understanding* yakni upaya untuk memahami dan menganalisis suatu fenomena sesuai dengan dunia pemahaman para pelakunya itu sendiri secara berulang dan mendalam (Neuman, 2000). Sedangkan metode kuantitatif meliputi: jenis pertanyaan tertutup didasarkan pada instrumen penelitian, merupakan analisa statistik dan memberikan intrepretasi statistik Creswell (2010).

3.2. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Observasi (pengamatan)
2. Interview (wawancara)
3. Dokumentasi
4. Triangulasi
5. Focus Group Discussion (FGD)

3.3. Metode analisis data

Adapun metode analisis data dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Metode Analisis Data

No	Sasaran Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Identifikasi kondisi saat ini desa wisata	Analisis deskriptif kualitatif	Identifikasi karakteristik desa yang memiliki potensi wisata
2	Identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh	Analisis delphi	Variabel yang disepakati
3	Analisis kelayakan pengembangan dari segi fisik, ekonomi dan sosial	Analisis AHP	Identifikasi bobot variabel yang didapatkan dari analisis Delphi
		Analisis skoring	Identifikasi tipologi desa wisata
		Analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif	Kelayakan fisik lingkungan, ekonomi dan sosial
4	Penentuan rekomendasi kebijakannya	Analisis deskriptif kualitatif	Rekomendasi kebijakan desa-desa yang terpilih (sangat potensial dikembangkan menjadi desa wisata)

Sumber: peneliti, 2020

Dalam menentukan tipologi desa wisata maka digunakan analisis skoring. Hasil analisis delphi berupa faktor-faktor terpilih pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek kemudian dijadikan input analisis AHP untuk menentukan bobot atau nilai tiap faktor.

Untuk mendapatkan pembagian tipologi desa wisata berdasarkan kesamaan karakteristik komponen pembentuk desa wisata, hasil dari skoring tiap variabel akan dikalikan dengan bobot dari masing-masing variabel AHP dan kemudian diakumulasikan dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai (hasil perkalian skor dan bobot) pada setiap variabel pada masing-masing desa. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat diketahui tipologi desa wisata menjadi beberapa klaster. Nilai maksimal yang digunakan adalah 5 dan nilai minimalnya adalah 1. Apabila dalam penelitian ini menggunakan 5 tipologi desa wisata, pembagian interval dan kelompok tipologi adalah:

Interval = (total nilai maksimal – total nilai minimal) / 5 = (5-1) / 5 = 1,333

Sehingga pembagian interval kelompok tipologi desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Pengelompokan Tipologi Desa Wisata

No	Tipologi	Interval	Keterangan
1	I	4,24 – 5	Sangat potensial
2	II	3,43 - 4,23	Potensial
3	III	2,62 - 3,42	Cukup potensial
4	IV	1,81 - 2,61	Kurang potensial
5	V	1 - 1,8	Tidak potensial

Sumber: peneliti, 2020

3.4. Populasi dan sampel penelitian

Dalam menentukan sampel penelitian, penelitian ini menggunakan metode *non random sampling* khususnya metode *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2013) *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

Dalam penentuan faktor penentu pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek, penelitian ini bertujuan untuk menggali pendapat para ahli terkait pengembangan desa wisata. Berdasarkan metode metode purposive sampling, maka responden dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah : Bappedalitbang, Dinas Paribud, Dinas Komidag dan Dinas PMD
2. Swasta: KADIN
3. Akademisi : ITS Surabaya
4. Pokdarwis : Durensari, Tebing Lingga, Pantai Mutiara, Margomulyo, Gupili
5. Masyarakat: Siti Nurul Hidayat (traveler)
6. LSM : PAMA
7. Pemerintah desa: Tasikmadu, Margomulyo, Sawahan.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Faktor pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek

Berdasarkan analisis delphi dan analisis AHP, maka faktor pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan kemudian dibuat model sebagai acuan pengembangan desa wisata sebagaimana gambar di bawah ini.

Tabel Faktor Pengembangan Desa Wisata

No	Faktor	Bobot (%)	Rank
1	Daya tarik wisata	14,4	1
2	Keunikan	13,4	2
3	Pelibatan dan penerimaan masyarakat	10,2	3
4	Tokoh penggerak	8,1	4
5	Kebijakan	7,5	5
6	Promosi dan informasi	6,9	6
7	SDM pengelola	6,7	7
8	Infrastruktur	5,9	8
9	Amenitas	5,3	9
10	Aksesibilitas	5,1	10
11	Kelembagaan	4,7	11
12	Kewirausahaan	3,5	12
13	Pembiayaan	3,3	13
14	Kemitraan	3,1	14
15	Kunjungan wisata	1,7	15
	Total	100	

Sumber: peneliti, 2020

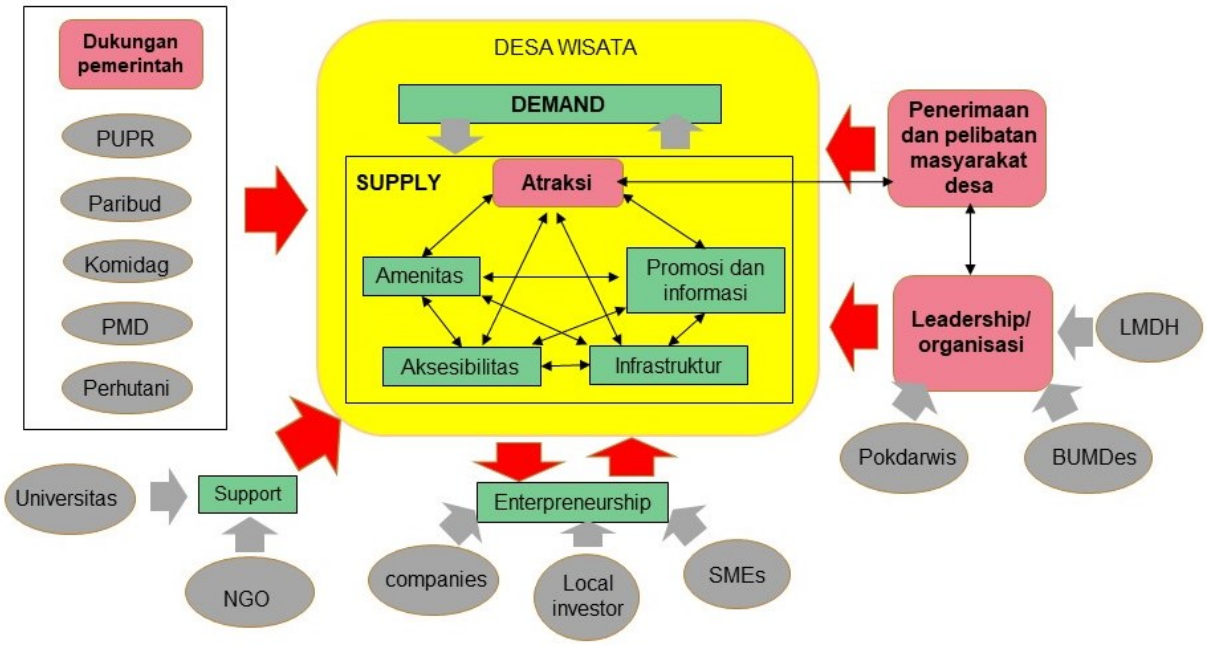
Berdasarkan tabel di atas maka dibuatkan model sebagai gambaran dan pedoman pengembangan desa wisata ke depan. Model dibuat dengan pendekatan *system thinking* yang menggambarkan keterkaitan dan keterikatan antar faktor.

Di dalam sistem pastinya ada *leverage* (pengungkit) yang menjadi faktor utama. Adapun hukum dari leverage adalah dengan perlakuan yang minimal akan mendapatkan kerja sistem yang optimal. Leverage inilah yang harus mendapatkan perhatian utama jika ingin mengembangkan desa wisata di Kabupaten Trenggalek. Adapun yang menjadi leverage bagi pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalak antara lain atraksi wisata, penerimaan dan pelibatan masyarakat serta adanya kelembagaan desa wisata.

Leverage inilah yang harus menjadi perhatian utama ketika mengembangkan desa wisata. Ketika ketiga faktor ini sudah terpenuhi, langkah selanjutnya adalah mengembangkan fasilitas dan infrastruktur pendukung berdasarkan kebutuhan wisatawan seperti penginapan, kuliner, aksesibilitas, infrastruktur (prasarana) serta mengoptimalkan promosi baik melalui media cetak atau daring. Kelembagaan desa wisata juga sangat penting untuk segera dibuat. Pemerintah desa bisa membuat BUMDes sebagai lembaga pengelola keuangan dan pembiayaan serta didukung oleh Pokdarwis sebagai bagian dari BUMDes-nya yang bertgas sebagai pengelola teknis obyek daya tarik wisata.

4.2. Klasifikasi skor tiap faktor pengembangan desa wisata

Berdasarkan Perda Nomor 26 Tahun 2017 tentang RIPKD, jumlah desa yang memiliki obyek daya tarik wisata sebesar 90 desa yang tersebar diseluruh kecamatan. Dari sejumlah desa tersebut, kemudian dieliminasi sebesar 21 desa karena berdasarkan hasil desk dengan kecamatan dan desa, keduapuluhsatu desa tersebut tidak memiliki potensi obyek daya tarik wisata sehingga jumlah desa yang di-skoring menjadi 69 desa. Skoring terhadap 69 desa



tersebut dilakukan dengan mengacu pada 15 faktor pengembangan desa wisata yang telah disepakati stakeholder. Kesimpulannya adalah hanya 6 faktor pengembangan yang memiliki nilai di atas standar rata-rata yaitu: 1) Aksesibilitas sebesar 3,63; 2) Prasarana pendukung sebesar 3,87; 3) Pelibatan masyarakat sebesar 3,02; 4) Kebijakan sebesar 3,55; 5) Kelembagaan sebesar 3,26; dan tokoh penggerak sebesar 3,84. Sedangkan 9 faktor pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek nilainya dibawah rata-rata. Jika ingin mengembangkan Kabupaten Trenggalek sebagai kabupaten yang berhasil desa wisatanya maka kesembilan faktor inilah yang perlu mendapatkan perhatian dan dorongan lebih. Secara keseluruhan rata-rata skor faktor pengembangan desa wisata di Kabupaten Trenggalek memiliki nilai 2,73 dengan kategori cukup layak untuk dikembangkan.

Tabel Rata-Rata Skor Tiap Faktor Desa Wisata

No	Faktor	Skor	Keterangan
1	Daya tarik wisata	2,31	Kurang potensial
2	Keunikan	2,29	Kurang unik
3	Promosi dan informasi	2,24	Kurang mendukung
4	Aksesibilitas	3,63	Memadai
5	Fasilitas pendukung	2,34	Kurang mendukung
6	Prasarana pendukung	3,87	Memadai
7	Kunjungan wisatawan	2,49	Kurang
8	Pembiayaan	2,46	Kurang mendukung
9	SDM pengelola	1,77	Kurang memadai
10	Kewirausahaan	2,01	Kurang berkembang
11	Pelibatan masyarakat	3,02	Cukup terlibat
12	Kebijakan	3,55	Mendukung
13	Kelembagaan	3,26	Cukup mendukung
14	Tokoh penggerak	3,84	Mendukung
15	Kemitraan	1,68	Sangat kurang
	RATA-RATA	2,73	CUKUP

Sumber: peneliti, 2020

4.3. Penentuan Tipologi Desa Wisata

Setiap desa yang memiliki potensi wisata akan dihitung skor tiap faktor kemudian dikalikan dengan bobot yang didapatkan dari analisis AHP. Hasil perkalian antara skor dan bobot tersebut tetap akan bernilai 1-5.

Berdasarkan tabel diatas nilai tertinggi berada di Desa Tasikmadu dengan tipologi sangat potensial (nilai 4,7), kemudian Desa Watuagung dengan tipologi sangat potensial (nilai 4,45) dan Desa Sawahan dengan tipologi sangat potensial (nilai 4,31). Ketiga desa tersebut berada di Kecamatan Watulimo. Tipologi berikutnya adalah desa-desa potensial yaitu: Desa Slawe dan Desa Nglebo. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa potensi andalan pariwisata di Kabupaten Trenggalek memang berada di pesisir selatan khususnya Kecamatan Watulimo. Selain potensi alam, desa-desa pesisir sangat kuat budayanya yang ditandai dengan banyaknya even/festival budaya yang ada disana khususnya ritual-ritual yang dipengaruhi oleh tradisi mataraman.

Tabel Rekapitulasi Skor Desa Wisata

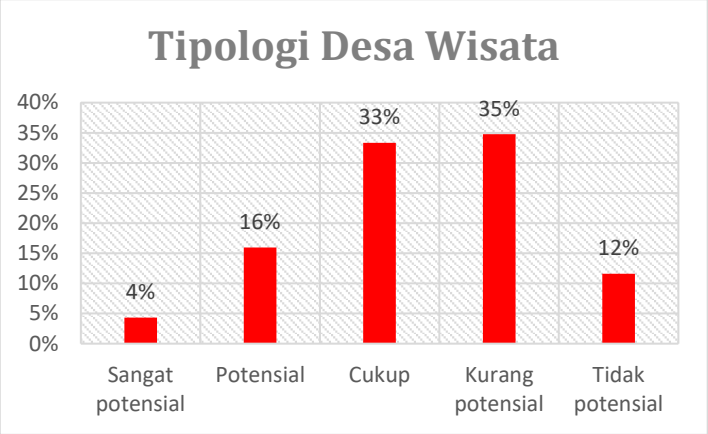
No	Tipologi	Jumlah	Persebaran
1.	Sangat potensial	3	Kecamatan Watulimo
2.	Potensial	11	Durenan, Pogalan, Trenggalek, Bendungan, Suruh, Karangan, Panggul, Watulimo
3.	Cukup	23	Tersebar di seluruh kabupaten
4.	Kurang potensial	24	Tersebar di seluruh kabupaten
5.	Tidak potensial	8	Kecamatan Durenan, Tugu, Pule, Suruh, Dongko
	Jumlah	69	

Sumber: peneliti, 2020

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hanya 20% desa di Kabupaten Trenggalek yang masuk kategori potensial dan sangat potensial. Sebesar 47% desa tidak berpotensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata. Lebih lanjut, jika mengacu pada keseluruhan desa di Kabupaten Trenggalek, proporsi tersebut menjadi lebih kecil yaitu hanya 9% yang potensial dan sangat potensial dikembangkan menjadi desa wisata. Sebesar 76% kurang dan tidak potensial dikembangkan menjadi desa wisata. Hal ini perlu mendapat perhatian serius karena sebagian besar desa membutuhkan usaha

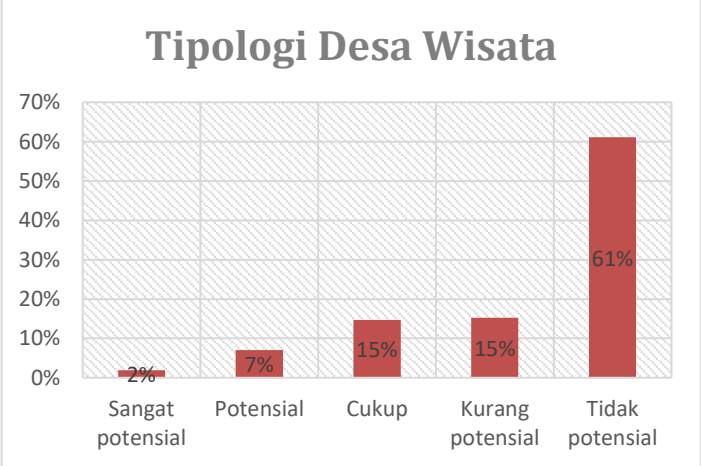
lebih yang sangat ekstra jika ingin menjadikan Kabupaten Trenggalek sebagai kabupaten yang berbasis desa wisata.

Grafik Tipologi Desa Wisata Berdasarkan Jumlah Desa Yang Memiliki Potensi Wisata



Sumber: peneliti, 2020

Grafik Tipologi Desa Wisata Berdasarkan Jumlah Seluruh Desa



Sumber: peneliti, 2020

4.4. Kelayakan Fisik Lingkungan, Ekonomi dan Sosial Budaya Desa Yang Memiliki Potensi Dikembangkan Menjadi Desa Wisata

A. Kelayakan fisik lingkungan

1. Analisis keseuaian dan kemampuan lahan

Sebesar 66,4% lahan di Kabupaten Trenggalek memiliki kemampuan pengembangan sebagai kawasan terbangun yang rendah dan sangat rendah. Kecamatan yang memiliki luas kemampuan pengembangan kawasan terbangun rendah dan sangat rendah adalah kecamatan yang ada di daerah pegunungan diantaranya Kecamatan Munjungan seluas 12.453 ha, Kecamatan Panggul seluas 10.296 ha dan Kecamatan Dongko seluas 8.965 ha. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengembangan wisata yang konvensional (*mass tourism*) sangatlah tidak cocok dikembangkan di Kabupaten Trenggalek. *Mass tourism* biasanya membutuhkan lahan yang kemampuan pengembangannya sedang sampai dengan sangat tinggi dimana dibutuhkan luasan lahan untuk pembangunan bangunan fisik. Berbeda dengan pariwisata yang berbasis masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang lebih menekankan pada keunikan daya tarik alam maupun budaya masyarakatnya. Desa wisata tidak membutuhkan bangunan fisik yang mendominasi luasan lahan tetapi berusaha mempertahankan bentang alam dan seminimal mungkin tidak mengkonversinya menjadi kawasan terbangun.

Berdasarkan analisis keseuaian lahan, sebesar 96,5% lahan di Kabupaten Trenggalek arahan penggunaan lahannya non permukiman perkotaan (kawasan terbangun). Arahan penggunaan lahan untuk kawasan lindung sebesar 30 % dan arahan kawasan terbangun untuk budidaya (hutan produksi, hutan rakyat, perkebunan, pertanian lahan kering dan permukiman secara terbatas dan bersyarat sekitar 67%. Pengembangan kawasan terbangun (permukiman) pada kedua kawasan tersebut, boleh dilakukan tetapi tidak mengubah dan merusak fungsi dari kawasan utama. Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengembangan desa wisata sangat layak secara lingkungan dimana ekosistem yang ada tetap dijaga kelestariannya.

Konsep desa wisata sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif merupakan suatu bentuk kepariwisataan yang tidak merusak lingkungan, berpihak pada ekologis dan menghindari dampak negatif dari pembangunan pariwisata berskala besar yang dijalankan pada suatu area yang tidak terlalu cepat pembangunannya. Kabupaten Trenggalek memiliki banyak potensi wisata yang letaknya di kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Desa wisata bisa saja dikembangkan dikedua kawasan tersebut dengan melaksanakan kerjasama terlebih dahulu dengan pihak Perhutani. Konsep desa wisata yang sangat memperhatikan dan mempertahankan kualitas lingkungan sebaiknya dijadikan peluang antar pihak untuk mengembangkannya secara bersama-sama.

B. Kelayakan ekonomi

Kelayakan ekonomi pada studi ini fokus pada desa-desa yang memiliki tipologi pengembangan desa wisatasangat potensial dan potensial. Adapun desa-desa yang termasuk ke dalam tipologi tersebut diantaranya Desa Tasikmadu, Desa Sawahan, Desa Watuagung dan Desa Slawe. Dalam menentukan kelayakan ekonomi pengembangan desa wisata digunakan parameter-parameter dan asumsi-asumsi yang melandasinya. Adapun asumsi yang digunakan antara lain: tingkat suku bunga, inflasi, jangka waktu investasi dan *discount rate*. Sedangkan parameter yang digunakan antara lain: NPV, IRR, BCR dan payback period. Hasil analisis kelayakan ekonomi terhadap desa wisata di Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada tebel di bawah ini.

Tabel Kelayakan Ekonomi Desa Wisata

No	Komponen kelayakan	Tasikmadu	Sawahan	Watuagung	Slawe
1.	Asumsi				
	a. Tingkat suku bunga	5,09	5,09	5,09	5,09
	b. Inflasi	2,89	2,89	2,89	2,89
	c. Jangka waktu investasi	10	3	5	4
	d. Discount rate	5,09	5,09	5,09	5,09
2.	Hasil:				
	a. NPV	645.761.343	23.309.834	91.147.684	68.114.606
	b. IRR	9,92	58,3	21,95	26,93
	c. BCR	1	1	1	1
	d. Payback period	6,38	1,06	2,6	2

Sumber: peneliti, 2020

Adapun analisis kelayakan ekonomi berdasarkan beberapa asumsi diantaranya tingkat suku bunga sebesar 5,09%, inflasi sebesar 2,89% dan *discount rate* sebesar 5,09%. Jangka waktu investasinya di setiap desa berbeda. Hal ini karena menyesuaikan dengan jenis investasi yang digunakan.

Berdasarkan tabel, nilai NPV dari keempat desa bernilai positif atau > 1. Artinya, usaha yang dijalankan layak dilaksanakan. Selanjutnya, untuk menilai kelayakan ekonomi juga digunakan *Internal Rate of Return (*IRR). Jika IRR > DF (*discount rate*) maka proyek layak dilaksanakan. Terakhir adalah BCR dimana semua desa memiliki nilai BCR 1. Artinya adalah sebenarnya proyek tidak menguntungkan maupun tidak merugikan. *Payback period* paling lama adalah Desa Tasikmadu selama 6,38 tahun sedangkan paling sebentar selama 1,06 tahun.

C. Kelayakan sosial budaya masyarakat

Kelayakan sosial masyarakat dan budaya dalam studi ini menggunakan beberapa indikator diantaranya daya tarik wisata (budaya), SDM pengelola wisata, pelibatan masyarakat, dukungan kebijakan, kelembagaan, tokoh penggerak serta kemitraan.

Sebenarnya daya tarik wisata budaya di Kabupaten Trenggalek cukup beragam. Permasalahannya adalah daya trik tersebut belum bisa "menjual." Padahal, desa wisata sangat mengedepankan keunikan budaya masyarakat sehingga menarik minat wisatawan yang ingin mendapatkan pengalaman dan mencari sesuatu yang bermakna bagi mereka.

Pembangunan desa wisata juga memerlukan SDM pengelola yang mumpuni. Berdasarkan kuesiner sebagian besar pengelola belum pernah mendapatkan pelatihan kepariwisataan dan hanya sebagian kecil yang memiliki sertifikat. Ke depan, guide sangat dibutuhkan wisatawan sebagai jembatan untuk mengenali apa yang dijual di desa wisata. Skor untuk SDM pengelola desa wisata di Kabupaten Trenggalek sebesar 1,77 atau masuk kategori kurang memadai.

Sebagai *Community Based Tourism* (CBT), desa wisata juga membutuhkan pelibatan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan monev pelaksanaan desa wisata. Masyarakat di sekitar lokasi wisata di Kabupaten Trenggalek cukup terlibat tetapi sebagian besar hanya pada tataran perencanaan dan pelaksanaannya saja.

Selanjutnya faktor regulasi juga menentukan keberhasilan pengembangan desa wisata. Pemerintah kabupaten telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung desa wisata diantaranya RTRW, RIPPARDA serta pembentukan kawasan strategis pariwisata. Berbagai kebijakan tersebut tentunya juga diikuti dengan komitmen anggaran yang akan dialokasikan.

Kelembagaan pengembangan desa wisata di Kabuaten Trenggalek cukup mendukung. Banyak pihak yang mengembangkan kelembagaan di tingkat desa seperti BUMDEs atau Pokdarwis. Kelembagaan yang ada dalam pengembangan desa wisata memegang peranan yang cukup penting sebagai pengelola dan pelaksana.

Tokoh penggerak memiliki peran penting dalam menggerakkan desa non wisata menjadi desa wisata. Tokoh penggerak akan mengajak masyarakat luas untuk bergerak di bidang pariwisata. Tokoh penggerak ini memiliki kedekatan yang sangat tinggi dengan masyarakat dan lokasi desa wisata. Tokoh penggerak di Kabupaten Trenggalek ada yang kepala desa maupun tokoh lokal.

Dalam mengembangkan desa wisata, yang tidak kalah penting adalah membangun kemitraan terutama kerjasama dengan pihak Perhutani sebagai "penguasa" sebagian besar lahan di Kabupaten Trenggalek. Permasalahan di lapangana dalah masih banyak destinasi wisata yang belum memiliki kejelasan kerjasama (MoU) dengan Perhutani. Selain itu, kerjasama dengan stakeholder lain juga masih sangat minim (skor 1,68 = kurang).

Secara budaya, masyarakat pesisir selatan Trenggalek mulai dari Kecamatan Panggul, Munjungan hingga Watulimo (Teluk Prigi) yang secara kultural adalah campuran masyarakat pesisir (nelayan) dan masyarakat agraris (petani). Dan yang secara kebudayaan dekat dengan Mataram(an).

Itu berbeda dengan wilayah Trenggalek bagian utara yang secara kultur lebih tua. Selain dipengaruhi Mataram Islam, Trenggalek bagian utara juga terhubung dengan Demak melalui keberadaan Minak Sraba, ayah Minak Sopal-tokoh bersejarah yang sangat dikenal di Trenggalek. Juga Trenggalek bagian utara terhubung dengan pengaruh kultur akhir Majapahit melalui ibu Minak Sopal, yakni Dewi Rara Amiswati-seorang perempuan yang berasal dari keraton Majapahit yang bertetirah ke Trenggalek.

4.5. Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan *scenario planning*, langkah krusial yang harus segera diketahui adalah apa yang menjadi *driving force* sebagai faktor kunci yang mempengaruhi kondisi di masa depan. Dalam penelitian ini *driving force* didapatkan dari hasil analisis AHP yatu 2 faktor yang memiliki ranking teratas yaitu faktor sumberdaya manusia dan faktor atraksi (daya tarik) wisata. Sebenarnya faktor sumber daya manusia merupakan gabungan dari faktor penerimaan dan pelibatan masyarakat, tokoh penggerak dan kelembagaan

Berdasarkan pada hasil analisis kelayakan, tipologi pengembangan desa wisata, serta *scenario planning* maka rekomendasi kebijakannya antara lain:

A. Rekomendasi *Optimization*
   Merupakan rekomendasi berdasarkan pada kondisi desa memiliki potensi daya tarik yang tinggi dan didukung oleh SDM-nya, antara lain:
   1. Memperkuat koordinasi perencanaan, implementasi dan monev program
   2. Memperkuat kelembagaan
   3. Bermitra dengan swasta
   4. Peningkatan kompetensi SDM pengelola secara rutin
   5. Berperan aktif dalam jaringan wisata
   6. Terus melakukan inovasi produk sesuai kebutuhan pasar serta standarisasi
   7. Melangkapi fasilitas pendukung
   8. Pengadaan media promosi yang bervariasi (travel agency, medsos)
   9. Memperluas pemasaran
   10. Menggali potensi budaya

B. Rekomendasi *Strengthening*
   Merupakan rekomendasi berdasarkan pada kondisi desa memiliki potensi daya tarik yang tinggi tetapi tidak didukung oleh SDM-nya, antara lain:
   1. Mulai bermitra dengan lembaga lain
   2. Adanya sosialisasi tentang kepariwisataan
   3. Mulai mengikuti pelatihan pengelolaan tempat wisata
   4. Berjejaring dengan desa wisata lain
   5. Pelatihan pembentukan kelembagaan desa wisata
   6. Keikutsertaan dalam forum kepariwisataan daerah
   7. Menyusun paket wisata dan melakukan promosi
   8. Pengembangan fasilitas dan sarana pendukung

C. Rekomendasi *Tourism Reform*
   Merupakan rekomendasi berdasarkan pada kondisi desa memiliki potensi daya tarik rendah tetapi dukungan SDM-nya tinggi, antara lain:

1. Implementasi rencana pengembangan potensi dan karakteristik desa menjadi daya tarik wisata
2. Menciptakan inovasi daya tarik wisata
3. Membangun sistem promosi dan pemasaran melalui brosur, leaflet, proposal, website, medsos dan peta petunjuk informasi di tempat strategis
4. Mengikuti event/kompetisi pengembangan desa wisata
5. Mensosialisasikan potensi kepada seluruh masyarakat
6. Menyusun rencana kerja pembangunan desa wisata
7. Merintis pembangunan fasilitas dan sarana pendukung

D. Rekomendasi *Survive and Develop*
Merupakan rekomendasi berdasarkan pada kondisi desa tidak memiliki potensi daya tarik dan dukungan SDM juga rendah, antara lain:
1. Menyusun informasi mengenai potensi dan karakteristik produk yang akan dipasarkan
2. Membangun fasilitas pendukung seperti mobility hub dan rest area
3. Melakukan inovasi pembuatan produk yang bisa dijual di tempat wisata desa lain
4. Membangun fasilitas akomodasi wisata

5. Kesimpulan

1. Prioritas faktor pengembangan desa wisata antara lain:
   a. Daya tarik wisata
   b. Keunikan
   c. Pelibatan dan penerimaan masyarakat
   d. Tokoh penggerak
   e. Kebijakan pendukung
2. Berdasarkan analisis kemampuan dan kesesuaian lahan, sebagian besar lahan di Kabupaten Trenggalek tidak sesuai jika dikembangkan secara masif (kepadatan tinggi). Desa wisata adalah salah satu bentuk wisata yang sangat memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
3. Berdasarkan analisis resiko bencana, Kabupaten Trenggalek layak dikembangkan dengan syarat memenuhi mitigasi bencana.
4. Berdasarkan analisis skoring terhadap faktor pengembangan, Kabupaten Trenggalek cukup layak dikembangkan sebagai desa wisata (skor 2,73 dari 5). Adapun faktor-faktor yang sudah cukup layak antara lain: 1) aksesibilitas; 2) Prasarana pendukung; 3) Pelibatan masyarakat; 4) Kebijakan pendukung; 5) Kelembagaan dan 6) Tokoh penggerak. Faktor yang kurang layak dan perlu mendapatkan perhatian ekstra antara lain: 1) daya tarik wisata; 2) keunikan; 3) promosi dan informasi; 4) fasilitas pendukung; 5) kunjungan wisatawan; 6) pembiayaan; 7) SDM pengelola; 8) Kewirausahaan; dan 9) kemitraan.
5. Berdasarkan analisis skoring tipologi terhadap desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi desa wisata, Kabupaten Trenggalek membutuhkan usaha yang ekstra jika ingin mem-"branding" kabupaten dengan desa wisata. → hanya 9% dari total desa yg layak dikembangkan menjadi desa wisata.
6. Desa Tasikmadu, Desa Watuagung, Desa Sawahan dan Desa Slawe, layak dikembangkan menjadi desa wisata dan dapat menjadi *best practice* (role model) bagi pengembangan desa yang ingin mengembangkan desanya menjadi desa wisata.

6. Saran

1. Menindaklanjuti *scenario planning* yang telah dirumuskan menjadi rencana aksi jangka menengah dan jangka pendek.
2. Mewajibkan desa wisata menyusun rencana kontigensi (mitigasi) bencana.
3. Memberikan reward terhadap desa-desa yang berhasil mengembangkan desa wisata melalui pemberian BKK desa.
4. Menjadikan desa wisata sangat potensial sebagai role model pengembangan desa wisata terutama terhadap desa yang memiliki kategori cukup layak.
5. Menjalin kemitraan terhadap berbagai stakeholder untuk bersama-sama meningkatkan kualitas faktor-faktor pengembangan desa wisata yang masih kurang layak.
6. Pemerintah dapat menginisiasi menyelenggarakan kompetisi desa wisata untuk menumbuhkembangkan tokoh penggerak (*local champion*).

7. Daftar Pustaka

Creswell, John, W., 2010. Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Goeldner, C. R., & Ritchie, J. R. B. 2009. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. (Tenth Edition). New Jersey: John Wiley & Sons

Hasegawa, Tadaki Santoso dan Ema Umilia, 2017. "Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Nepa Berdasarkan Preferensi Pengunjung Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang". Jurnal Teknik ITS Vol. 6, No. 1.

Inskeep, Edward, 1991. Tourism Planning: An Integrated Sustainable Development

Kusmayadi; Sugiarto, Endar. 2000. Metodologi Penelitian dalam Bidang Kepariwisataan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Ma'ruf, Irfan, 2019. Gubernur Khofifah Andalkan Dewi cemara Untuk Persempit Kesenjangan Desa-Kota. Melalui: https://www.inews.id/news/nasional/gubernur-khofifah-andalkan-dewi-cemara-untuk-persempit-kesenjangan-kota-desa . Diakses [25/1/21]

Marpaung, Happy. 2002. Pengetahuan Kepariwisataan. Bandung: Alfabeta.

Muallisin, Isnaini. 2007. Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Jurnal Penelitian BAPPEDA Kota Yogyakarta.

Neuman, W Lawrence, 2000. *Social Reseach Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Allyn and Bacon.

Nuryanti, Wiendu,1993. Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press

Priyanto, Safitri, Diah, 2016.Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata di Jawa Tengah.

Suwena, I Ketut, 2010. Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata. Denpasar: Udayana Press

Suansri, P. 2003. Community Based Tourism Handbook. Thailand: Rest Project.

Widyawati, Tuti dan Samsul Ma'rif, 2004. "Pemetaan Tipologi Daya Tarik Wisata Dalam Kerangka Pengembangan Potensi Pariwisata Desa Bondo Kabupaten Jepara." Jurnal Teknik PWK Undip Vol 3 Nomor 4.

Yoeti, Oka, 1996. Pengantar Ilmu Pariwisata. Penerbit Angkasa.Bandung